

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1. Pengertian Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan tahunan dengan mengacu pada dokumen Rencana Strategis dan kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Rencana kerja Sekretariat DPRD memuat kebijakan, program, dan kegiatan satu tahun yang dilaksanakan sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang Sekretariat DPRD dengan mempertimbangkan pelaksanaan renja tahun sebelumnya.

Perencanaan Pembangunan Nasional, diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, dan pada skala Pembangunan Daerah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

1.1.2 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

1. Persiapan Penyusunan: Persiapan penyusunan renja meliputi: (a) Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah (b) Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah (c) Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan (d) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPDRencana Kerja pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berjalan.
2. Penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah mencakup: (a) Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan (b) Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.
3. Penyusunan Rancangan Penyusunan rancangan Renja

Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah tersebut dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah dan sudah harus selaras dengan Rancangan Akhir RKPD.

4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah dilakukan pembahasan dengan pemangku kepentingan yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah.
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.
6. Penetapan Renja Perangkat Daerah yang menjadi dokumen perencanaan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

1.1.3 Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 memperhatikan program prioritas dan mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar TA 2025 yang isinya telah dijabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Visi dan Misi Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar. Renja

Sekretariat DPRD ikut berpartisipasi dalam mendukung misi pertama Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar yakni **“Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan”** sesuai dengan fungsi Sekretariat DPRD sebagai unsur pelayanan terhadap Anggota DPRD. Selain itu, Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 merupakan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis Perubahan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026.

1.2 Landasan Hukum

Dalam menyusun Rancangan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Kepulauan Selayar Tahun 2023 berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 serta Landasan operasional antara lain Perundang-Undangan yang berlaku yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2026;
17. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 107 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rancangan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai dokumen perencanaan kegiatan untuk jangka waktu 1 tahun kedepan yang ditetapkan untuk memberi arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh komponen program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD;
2. Sebagai bahan evaluasi kegiatan tahun sebelumnya.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat daerah ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan Peran fungsi Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
2. Untuk mewujudkan sinergitas, efisiensi dan efektifitas perencanaan dan alokasi anggaran;
3. Agar seluruh program dan kegiatan yang tersusun tepat sasaran.

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang**
- 1.2 Landasan Hukum**
- 1.3 Maksud dan Tujuan**
- 1.4 Sistematika Penulisan**

Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2023

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023**
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD**
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD**
- 2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD**

Bab III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja
- 3.3 Program dan Kegiatan

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD
TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD

Tujuan dari evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja yakni menilai tingkat keberhasilan kinerja dan melihat faktor-faktor yang menjadi kekurangan ataupun kelebihan dalam pelaksanaannya sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan Tahun Anggaran berikutnya. Tolak ukur dari penilaian kinerja dalam pelaksanaan evaluasi adalah tingkat pencapaian tujuan dan sasaran. .

Berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021 – 2026, Sekretariat DPRD memiliki empat fungsi yang meliputi: Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD; Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dari tugas dan fungsi diatas, maka ditetapkan tujuan Sekretariat DPRD sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perubahan Tahun 2021 s/d 2026 adalah Mewujudkan Reformasi birokrasi Sekretariat DPRD, kemudian dari tujuan diatas maka ditetapkanlah sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan Perangkat Daerah;
2. Meningkatnya dukungan layanan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yakni fungsi pembentukan perda, Fungsi Anggaran dan Fungsi pengawasan.

Untuk mewujudkan sasaran diatas pada tahun 2023 telah dilaksanakan 2 program dan 17 kegiatan berdasarkan Permendagri 90 tahun 2019 dan kepmendagri No.050-3708 tahun 2020.

Dana yang tersedia pada Seckretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar setiap tahun dianggarkan dari APBD Kabupaten Kepulauan Selayar yang dialokasikan melalui DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan jumlah dana dalam APBD Tahun 2023 setelah perubahan sebesar Rp. 31.815.206.251,- yang terdiri dari :

Setelah Perubahan

- | | |
|--------------------|---------------------|
| 1. Belanja Operasi | Rp. 31.530.156.251, |
| 2. Belanja Modal | Rp. 285.050.000, |

Realisasi anggaran sebesar Rp 31.550.339.937 atau 99,17%, dengan sisa anggaran sebesar Rp. 264.866.314 atau 0,83%.

Evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD tahun 2023 dapat dilihat pada tabel TC-29 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tabel : T-C 29
Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023
Kabupaten Kepulauan Selayar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d tahun 2024	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata persentase keterpenuhan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
		Persentase keterpenuhan sarana dan prasarana Aparatur yang memadai								
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Persentase keterpenuhan Dokumen perencanaan dan Laporan kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%

	Perangkat Daerah									
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	5 Dokumen	3 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	13	260%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3	300%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3	300%
	Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3	300%
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3	300%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	12 Laporan	6 Dokumen	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	30	250%

		Realisasi Kinerja SKPD								
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	"Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	1 Laporan	1 Laporan dan 2 Aplikasi (E-survei dan Sipejabat)	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3	300%
	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persentase keterpenuhan Dokumen pelaporan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang memperoleh gaji dan tunjangan	26 Orang/bulan	12 Dokumen	26 Orang/bulan	26 Orang/bulan	100%	26 Orang/bulan	N/A	300%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3	300%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	36	300%
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	36	300%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3	300%

	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3	300%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	36	300%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Dokumen Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	6	300%
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	36	300%
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	36	300%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Pegawai Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%

	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	36	300%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	10 Orang	-	-	100%	10 Orang	20	200%
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	29 Orang	29 Orang	29 Orang	29 Orang	100%	29 Orang	87	300%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	20 Paket	20 Paket	100%	20 Paket	60	300%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	6	300%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	200 Paket	200	200 Paket	200 Paket	100%	200 Paket	600	300%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	40 Paket	53 Baliho/ spanduk, 30,002 cetak fotocopy	40 Paket	40 Paket	100%	40 Paket	120	300%

	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	500 orang	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	N/A	300%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	36 rapat	36 Laporan	36 Laporan	100%	36 Laporan	108	300%
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-	-		-	-	-	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhan sarana dan prasarana kerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
	Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan aatau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan PerOrangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	-	-	-	100%	-	-	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	13 Unit	13 Unit	13 Unit	100%	13 Unit	39	300%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	35 Unit	35 Unit	-	-	100%	-	35	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhan Jasa Urusan Pemerintahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	500 Surat	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	N/A	300%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	36 Resi	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	N/A	300%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	60 Jasa	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	N/A	300%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	N/A
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan PerOrangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 unit	4 Unit	4 unit	4 unit	100%	4 unit	12 Unit	300%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	38 unit	36 Unit	37 unit	37 unit	100%	38 unit	111 unit	292%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	45 unit	30	35 unit	35 unit	100%	45 unit	110 Unit	244%

		Dipelihara								
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 unit	6 Unit	6 unit	6 unit	100%	6 unit	18 Unit	300%
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Keterpenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	25 Orang/bulan	12	25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	100%	25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	300%
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	125 Paket	125 Paket	100 Paket	100 Paket	100%	125 Paket	350 Paket	280%
	Pelaksanaan <i>Medical Check Up</i> DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti <i>Medical Check Up</i> DPRD	25 orang	25 Orang	-	-	100%	25 orang	50 Orang	200%
	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Keterpenuhan Layanan Administrasi DPRD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	12 Dokumen	5 Layanan	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	36 Dokumen	300%
	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	12 Laporan	6 Laporan	-	-	100%	12 Laporan	18 Laporan	150%
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi	14 Laporan	6 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	100%	14 Laporan	28 Laporan	200%

	Konsultasi DPRD	dan Konsultasi DPRD								
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan			8 Paket	8 Paket	100%		8 Paket	N/A
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Program Kerja DPRD Tersusun dan Terintegrasi Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) dan dokumen penganggaran setwan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
		Rata-rata Persentase Keterpenuhan Layanan Terhadap Pelaksanaan Tugas Anggota DPRD dalam Fungsi Pengawasan, Penganggaran dan Pembentukan Perda	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Cakupan layanan dalam pembahasan perda (%)	100%	102%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	5 Dokumen	5 Layanan Kunker dan 3 Layanan Rapat	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	15 Dokumen	300%
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	30 Dokumen	16 Layanan Kunker dan 18	30 Dokumen	30 Dokumen	100%	30 Dokumen	76 Dokumen	253%

				Layanan Rapat						
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	3 Dokumen	-	-	-	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
	Pembahasan kebijakan anggaran	Persentase Rapat Pembahasan yang terselenggara terhadap rapat yang terjadwal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	10 Dok	10 Layanan	10 Dok	10 Dok	100%	10 Dok	30 Dokumen	300%
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	10 Dok	10 Layanan	10 Dok	10 Dok	100%	10 Dok	30 Dokumen	300%
	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	11 Dok	1 Layanan Konsultasi , dan 12 Layanan Rapat	11 Dok	11 Dok	100%	11 Dok	34 Dokumen	309%
	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	11 Dok	1 Layanan Konsultasi , dan 12 Layanan Rapat	11 Dok	11 Dok	100%	11 Dok	34 Dokumen	309%
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	10 dok	1 Layanan Konsultasi , dan 12 Layanan	10 dok	10 dok	100%	10 dok	33 dok	330%

				Rapat						
	Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan	Rata-Rata Persentase Rapat dan Kunjungan Kerja yang diselenggara terhadap rapat yang terjadwal	100%	104%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
	Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	15 Laporan	5 Layanan Kunker, 10 Layanan Rapat	15 Laporan	15 Laporan	100%	15 Laporan	45 laporan	300%
	Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Insfrakstruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	15 Laporan	5 Layanan Kunker, 10 Layanan Rapat	15 Laporan	15 Laporan	100%	15 Laporan	45 laporan	300%
	Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	15 Laporan	5 Layanan Kunker, 10 Layanan Rapat	15 Laporan	15 Laporan	100%	15 Laporan	45 laporan	300%
	Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	15 Laporan	5 Layanan Kunker, 10 Layanan Rapat	15 Laporan	15 Laporan	100%	15 Laporan	45 laporan	300%
	Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	15 Laporan	7 Layanan Kunker, 10 Layanan	15 Laporan	15 Laporan	100%	15 Laporan	47 laporan	313%

				Rapat						
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh BPK	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	5 Dokumen	6 Layanan Kunker, 11 Layanan Rapat	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	27 Dokumen	540%
	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	5 Dokumen	10 Layanan	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	20 Dokumen	400%
	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	5 Dokumen	5 Layanan	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	15 Dokumen	300%
	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Keterpenuhan Layanan Peningkatan Kapasitas lembaga DPRD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	78 Dokumen	78	78 Dokumen	78 Dokumen	100%	78 Dokumen	234 Dokumen	300%
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	60 Dokumen	60	60 Dokumen	60 Dokumen	100%	60 Dokumen	180 Dokumen	300%
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	21 orang	21	21 orang	21 orang	100%	21 orang	63 orang	300%

	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	60 orang	60	60 orang	60 orang	100%	60 orang	180 orang	300%
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	75 Dokumen	3	-	-	100%	75 Dokumen	75 Dokumen	100%
	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	2 Layanan	-	-	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	300%
	Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	Cakupan Layanan dalam penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	75 Laporan	75 Layanan	75 Laporan	75 Laporan	100%	75 Laporan	225 laporan	300%
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	2 Dokumen	-	-	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	300%
	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	75 Dokumen	75 Layanan	75 Dokumen	75 Dokumen	100%	75 Dokumen	225 Dokumen	300%
	Pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD	Cakupan Layanan dalam Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik	100%		100%	100%	100%	100%	300%	300%
	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	-	-	-	-	100%	-		
	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	5 Laporan	5 Layanan	5 Laporan	5 Laporan	100%	5 Laporan	15 Laporan	300%

	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Keterpenuhan Layanan Terhadap Tugas DPRD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	33 Dokumen	45 Layanan	33 Dokumen	33 Dokumen	100%	33 Dokumen	111 Dokumen	336%
	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Laporan	-	-	-	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	10 Dokumen	1 Layanan perjalanan Dinas, 24 Layanan Rapat	10 Dokumen	10 Dokumen	100%	10 Dokumen	45 Dokumen	450%
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	50 Dokumen	50 koordinasi dan konsultasi	50 Dokumen	50 Dokumen	100%	50 Dokumen	150 Dokumen	300%

Berdasarkan table diatas dapat dikemukakan bahwa kinerja rata-rata sub kegiatan/kegiatan Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2023 mencapai 100%, meskipun terdapat 1 sub kegiatan yakni Fasilitasi Fraksi DPRD direfocusing karena mempertimbangkan keadaan anggaran dan kepentingan pelaksanaan sub kegiatan/kegiatan.

Selain pada sub kegiatan Fasilitasi Fraksi DPRD yang direfocusing, kegiatan lain telah memenuhi target yang telah direncanakan. Pencapaian target realisasi tersebut di dukung oleh kerja sama dan komitmen yang terjalin pada seluruh staf bagian umum dalam menyiapkan fasilitas sarana dan prasarana yang diperlukan pada saat penyelenggaraan rapat dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Kebijakan-kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu dilakukan untuk mengatasi factor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Penyediaan anggaran yang memadai secara bertahap untuk dapat mengakomodir masukan Anggota DPRD dari Survey Tingkat Kualitas Layanan Sekretariat DPRD dan LHE SAKIP;
- b. Penyediaan Sumber Daya Aparatur sesuai dengan formasi bidang tugas yang dibutuhkan dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan terhadap DPRD;
- c. Intensif dalam melakukan penyesuaian terhadap peraturan terbaru terkait pelayanan kepada Anggota DPRD dan menjalin komunikasi yang baik dengan Anggota DPRD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas persetujuan DPRD dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sekretaris DPRD dibantu oleh pejabat struktural eselon III, yaitu Kepala Bagian, dan eselon IV yaitu Kepala Sub Bagian, dan Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 120 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, "Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD". Dalam

menyelenggarakan tugas Sekretariat DPRD mempunyai fungsi:

- Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
- Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

Capaian kinerja organisasi Sekretariat DPRD diukur mengacu pada indikator kinerja dari sasaran yang terdiri dari input, output dan outcome. Indikator kinerja beserta target sasaran dan program DPRD tertuang dalam perjanjian kinerja sekretariat TA 2023, berfungsi sebagai alat ukur untuk menilai keberhasilan tujuan organisasi. Keberhasilan sasaran yang didukung oleh program dan kegiatan dilakukan melalui pengukuran keberhasilan setiap indikator dengan membandingkan target dengan realisasi.

Keberhasilan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat dari pencapaian indikator dan yang telah ditetapkan. Hasil keberhasilan kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kab Kepulauan Selayar dapat dilihat pada Tabel 2.2 (Tabel.T-C.30) berikut ini :

Tabel 2.2
Tabel T – C 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD
Kab. Kepulauan Selayar

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	6	7	8	8	9	10	12		13
1	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD			B(65)	BB(70)	BB(75)	A (80)	B (61,35)	N/A	BB(75)	A (80)	
2	Laporan Keuangan yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan			Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	N/A	Sesuai	Sesuai	
4	Persentase pelaksanaan program kerja DPRD tepat waktu			100%	100%	100%	100%	100&	N/A	100%	100%	
5	Tingkat Kualitas Layanan Sekretariat DPRD			70	75	80	85	80	N/A	80	85	

Sumber : Renstra Tahun 2021-2026 dan LAKIP Sekretariat DPRD TA 2023

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam matrik perbandingan antara target dan realisasi kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.3
Target Dan Realisasi Sasaran Kinerja Tahun 2023

No	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	REALISASI	TKT CAPAIAN (%)	PREDIKAT
1	Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat terhadap pelayanan perangkat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	B(65)	B (61,35)	94,38%	RENDAH
		Laporan Keuangan yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	Sesuai	Sesuai	100%	SANGAT TINGGI
3	Meningkatnya dukungan layanan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yakni fungsi pembentukan perda, Fungsi Anggaran dan Fungsi pengawasan	Persentase pelaksanaan program kerja DPRD tepat waktu	100%	100%	100%	SANGAT TINGGI
		Tingkat Kualitas Layanan Sekretariat DPRD	70	80	114%	SANGAT TINGGI

Sumber : Renstra Tahun 2021-2026 dan LAKIP Sekretariat DPRD TA 2023

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Sekretariat DPRD memiliki dua tanggung jawab yakni secara adminitsratif dan operasional. Secara administratif Sekretariat DPRD bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah, dan

secara operasional Sekretariat DPRD bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD. Sehingga dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya Sekretariat DPRD perlu untuk menyeimbangkan kedua tanggung jawab tersebut dengan berbagai faktor eksternal dan internal yang berada di lingkungan Sekretariat DPRD. Sebagai lembaga birokrasi, Sekretariat DPRD dalam memberikan pelayanan kepada DPRD dituntut untuk tidak terlibat dalam politik praktis dan harus memiliki mentalitas kuat dan kemampuan untuk mengakomodir kepentingan dalam mendukung kinerja DPRD.

Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut kemudian dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Sehingga diperlukan kemampuan untuk mengenali serta merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Isu-isu Strategis ditetapkan melalui analisa lingkungan kerja berupa faktor eksternal dan internal untuk menentukan tingkat urgensi dan dampak potensialnya yang dilanjutkan dengan penentuan skala prioritas. Adapun yang menjadi isu-isu strategis di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, meliputi:

1. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur dalam hal kuantitas dalam meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD;
2. Dinamika politik mempengaruhi kinerja sehingga menuntut mentalitas yang kuat dalam mengakomodir berbagai kepentingan semua pihak;
3. Kualitas dari Sumber Daya Aparatur masih rendah dalam hal kesadaran akan tanggung jawab dan disiplin kerja, terdapat beberapa aparat yang masih lalai terhadap tanggung jawabnya dan memberikan beban kerja kepada pihak lain;
4. Keterbatasan anggaran dalam mendukung penyediaan sarana dan prasarana dengan kualitas yang baik dan maksimal.

Dari uraian isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sangatlah berpengaruh terhadap dampak pencapaian visi, misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Menurut Analisis SWOT adalah sebagai berikut :

Kekuatan (Strength) :

- a. Tersedianya anggaran operasional yang cukup memadai.
- b. Tersedianya Tata Tertib dan Kode Etik DPRD berdasarkan Peraturan DPRD yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

- c. Terjalinnnya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan DPRD.
- d. Kedudukan Sekretariat DPRD yang lebih fungsional dengan ditetapkannya UU No. 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Kelemahan (Weakness):

- a. Kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD yang belum optimal;
- b. Kurangnya disiplin dan motivasi kerja aparatur;
- c. Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
- d. Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia.

Peluang (Oportunity) :

- a. Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan anggota DPRD;
- b. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis;
- c. Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus diikuti dengan peningkatan aksesibilitasnya;
- d. Dimungkinkannya pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka mendukung kinerja DPRD.

Tantangan (Threat):

- a. Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan;
- b. Seringnya terjadi perubahan kebijakan terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
- d. Masih banyaknya hambatan-hambatan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh di Sekretariat.

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah rekomendasi isu-isu pelayanan teknis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yakni :

1. Penyediaan anggaran yang memadai secara bertahap untuk dapat mengakomodir masukan Anggota DPRD dari Survey Tingkat Kualitas Layanan Sekretariat DPRD dan LHE SAKIP;
2. Penyediaan Sumber Daya Aparatur sesuai dengan formasi bidang tugas yang dibutuhkan dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan terhadap DPRD;
3. Intensif dalam melakukan penyesuaian terhadap peraturan terbaru terkait pelayanan kepada Anggota DPRD dan menjalin komunikasi yang baik dengan Anggota DPRD.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam proses perencanaan awal program dan kegiatan RKPD yang terdapat dalam Renstra Sekretariat DPRD 2021-2026 , terdapat beberapa usulan kegiatan yang berubah. Hal ini disebabkan karena adanya analisis kebutuhan yang berbeda pada tahun sebelumnya, regulasi terbaru dan mempertimbangkan ketersediaan anggaran.

Tabel 2.4
Tabel T-C31
Review terhadap Rancangan RKPD Perubahan Tahun 2025
Sekretariat DPRD Kab. Kepulauan Selayar

No .	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rata-rata persentase keterpenuhan capaian kinerja dan keuangan	100%	20.691.205. 400	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Rata-rata persentase keterpenuhan capaian kinerja dan keuangan	100%	17.765.533.700	

			Persentase keterpenuhan sarana dan prasarana Aparatur yang memadai	100%				Persentase keterpenuhan sarana dan prasarana Aparatur yang memadai	100%		
	Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		Persentase Keterpenuhan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja	100%	112.735.500	Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		Persentase Keterpenuhan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja	100%	144.395.100	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	5 Dok	56.620.600	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	5 Dok	91.280.200	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	7.480.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	7.480.000	

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	7.574.900	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	5.574.900	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	4.030.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	4.030.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	4.030.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	4.030.000	

	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Lap	18.000.000	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Lap	17.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Lap	15.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Lap	15.000.000	
	Admnistrasi keuangan perangkat daerah		Persentase Keterpenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan	100%	2.550.638.400	Admnistrasi keuangan perangkat daerah		Persentase Keterpenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan	100%	2.399.074.850	

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah ASN yang memperoleh gaji dan tunjangan	26 Orang/ Bulan	2.468.351.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah ASN yang memperoleh gaji dan tunjangan	26 Orang/ Bulan	2.324.644.150	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pegujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dok	24.600.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pegujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dok	18.243.300	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dok	18.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dok	18.000.000	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	7.611.400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	7.611.400	
	Pegelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dok	17.076.000	Pegelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dok	17.076.000	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semester SKPD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Lap	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semester SKPD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Lap	13.500.000	
	Admnistrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		Persentase Keterpenuhan Dokumen Barang Milik Daerah	100%	10.000.000	Admnistrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		Persentase Keterpenuhan Dokumen Barang Milik Daerah	100%	10.000.000	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dok	3.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dok	3.000.000	

	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Lap	2.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Lap	2.000.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Lap	5.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Lap	5.000.000	
	Admnistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Keterpenuhan Administrasi Pegawai Perangkat Daerah	100%	261.878.400	Admnistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Keterpenuhan Administrasi Pegawai Perangkat Daerah	100%	137.834.500	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dok	3.013.200	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dok	3.013.200	

	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	29 Orang	258.865.200	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	29 Orang	134.821.300	
	Admnistrasi Umum Perangkat daerah		Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum	100%	578.970.000	Admnistrasi Umum Perangkat daerah		Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum	100%	523.361.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi / Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	15.310.000	Penyediaan Komponen Instalasi / Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	15.310.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		62.500.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	200 Paket		

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	40 Paket	34.002.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	40 Paket	42.444.300	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Lap	40.190.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Lap	117.815.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Lap	426.968.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Lap	347.791.700	
	Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		Persentase Keterpenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	100%	2.400.607.600	Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		Persentase Keterpenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	100%	395.273.600	

	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		1.963.800.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			
	Pengadaan Mebel	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		92.950.000	Pengadaan Mebel	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	92.950.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	343.857.600	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	302.323.600	
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		Persentase Keterpenuhan Jasa Urusan Pemerintahan	100%	737.911.950	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		Persentase Keterpenuhan Jasa Urusan Pemerintahan	100%	756.656.450	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Lap	11.308.950	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Lap	8.108.950	

	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	253.380.000	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	316.740.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	473.223.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	431.807.500	
	Pemeliharaan Barang Milik daerah penunjang pemerintah daerah		Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100%	739.551.500	Pemeliharaan Barang Milik daerah penunjang pemerintah daerah		Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100%	938.472.500	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Kendaraan PerOrangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	196.470.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Kendaraan PerOrangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	196.470.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit	97.862.500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit	97.862.500	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	20.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	28.770.000	

	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	425.219.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	615.370.000	
	Layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD		Persentase Keterpenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100%	12.377.342.650	Layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD		Persentase Keterpenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100%	11.538.896.300	
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	25 Orang/Bulan	11.501.533.700	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	25 Orang/Bulan	11.162.865.900	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	125 Paket	372.913.000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	125 Paket	336.958.400	
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD		502.895.950	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	25 Orang	39.072.000	

	Layanan Administrasi DPRD		Persentase Keterpenuhan Layanan Administrasi DPRD	100%	921.569.400	Layanan Administrasi DPRD		Persentase Keterpenuhan Layanan Administrasi DPRD	100%	921.569.400	
	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	12 Dok	10.020.500	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	12 Dok	10.020.500	
	Fasilitasi Fraksi DPRD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD		5.036.000	Fasilitasi Fraksi DPRD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	3 Lap	5.036.000	
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	8 Lap	18.512.900	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	8 Lap	18.512.900	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	8 Paket	888.000.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	8 Paket	888.000.000	

		Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng					Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng				
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		Persentase Program Kerja DPRD yang Terintegrasi dengan Program RPJMD dan RKPD (%)	100%	14.779.912. 400	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		Persentase Program Kerja DPRD yang Terintegrasi dengan Program RPJMD dan RKPD (%)	100%	12.783.955.100	
			Rata rata persentase keterpenuhan layanan terhadap pelaksanaan tugas anggota DPRD dalam fungsi Pengawasan, penganggaran dan pembentukan perda	100%				Rata rata persentase keterpenuhan layanan terhadap pelaksanaan tugas anggota DPRD dalam fungsi Pengawasan, penganggaran dan pembentukan perda	100%		
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		Cakupan Layanan dalam Pembahasan Perda (%)	100%	3.127.253.0 00	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		Cakupan Layanan dalam Pembahasan Perda (%)	100%	1.852.902.200	

	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	5 Dok	305.000.000	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	5 Dok	22.661.000	
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	30 Dok	2.822.253.000	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	30 Dok	1.830.241.200	
	Pembahasan kebijakan anggaran		Persentase Rapat Pembahasan yang terselenggara terhadap rapat yang terjadwal	100%	692.862.300	Pembahasan kebijakan anggaran		Persentase Rapat Pembahasan yang terselenggara terhadap rapat yang terjadwal	100%	689.680.200	
	Pembahasan KUA dan PPAS	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	10 Dok	25.000.300	Pembahasan KUA dan PPAS	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	10 Dok	23.005.300	

	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	10 Dok	24.996.800	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	10 Dok	17.995.000	
	Pembahasan APBD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	11 Dok	214.288.000	Pembahasan APBD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	11 Dok	225.236.000	
	Pembahasan APBD Perubahan	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	11 Dok	214.288.600	Pembahasan APBD Perubahan	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	11 Dok	211.155.500	
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	10 Dok	214.288.600	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	10 Dok	212.288.400	

	Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan		Rata-Rata Persentase Rapat dan Kunjungan Kerja yang terselesaikan terhadap rapat yang terjadwal	100%	4.695.840.000	Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan		Rata-Rata Persentase Rapat dan Kunjungan Kerja yang terselesaikan terhadap rapat yang terjadwal	100%	3.436.401.700	
	Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan hukum	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	15 Lap	1.493.780.000	Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan hukum	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	15 Lap	1.176.174.600	
	Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Insfrakstruktur	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	15 Lap	1.418.894.700	Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Insfrakstruktur	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	15 Lap	980.226.200	
	Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	15 Lap	1.306.930.000	Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	15 Lap	1.052.166.200	

	Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	15 Lap	148.638.500	Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	15 Lap	23.140.500	
	Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	15 Lap	164.177.000	Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	15 Lap	134.121.000	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh BPK	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	5 Dok	148.638.600	Pengawasan Urusan Pemerintahan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh BPK	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	5 Dok	56.935.200	
	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	5 Dok	2.680.400	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	5 Dok	2.512.200	

	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	5 Dok	12.100.800	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	5 Dok	11.125.800	
	Peningkatan Kapasitas DPRD		Persentase Keterpenuhan Layanan Peningkatan Kapasitas lembaga DPRD	100%	2.802.631.400	Peningkatan Kapasitas DPRD		Persentase Keterpenuhan Layanan Peningkatan Kapasitas lembaga DPRD	100%	2.698.497.000	
	Pendalaman Tugas DPRD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	25 Dok	1.517.626.000	Pendalaman Tugas DPRD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	25 Dok	520.393.000	
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	60 Dok	255.000.000	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	60 Dok	295.000.000	

	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	21 Orang	30.000.400	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	21 Orang	93.954.000	
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	60 Orang	180.000.000	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	60 Orang	180.000.000	
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	75 Dokumen	820.005.000	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	75 Dokumen	1.609.150.000	
	Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat		Cakupan Layanan dalam penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat (%)	100%	2.455.908.900	Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat		Cakupan Layanan dalam penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat (%)	100%	2.476.260.900	
	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	75 Lap	295.908.900	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	75 Lap	316.260.900	

	Pelaksanaan Reses	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	75 Dok	2.160.000.000	Pelaksanaan Reses	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	75 Dok	2.160.000.000	
	Pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD		Cakupan Layanan dalam Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik	100%	66.246.500	Pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD		Cakupan Layanan dalam Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik	100%	64.224.200	
	Pengawasan Kode Etik DPRD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	5 Lap	66.246.500	Pengawasan Kode Etik DPRD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	5 Lap	64.224.200	
	Fasilitasi Tugas DPRD		Persentase Keterpenuhan Layanan Terhadap Tugas DPRD	100%	939.170.300	Fasilitasi Tugas DPRD		Persentase Keterpenuhan Layanan Terhadap Tugas DPRD	100%	1.565.988.900	
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	33 Dok	326.434.000	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	33 Dok	185.640.000	

	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	10 Dok	222.695.800	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	10 Dok	219.005.100	
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	53 Dok	390.040.500	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	53 Dok	1.161.343.800	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Terhadap Kebijakan Nasional

Seiring tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD sebagai unsur fasilitasi/pelayanan kepada DPRD yang memiliki peran penting untuk dapat mewujudkan visi, misi tersebut, maka dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 - 2026 merupakan salah satu OPD pelaksana Misi yaitu : “Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan” *dengan tujuan RPJMD* “Mewujudkan Reformasi Birokrasi Daerah”

Dari Rumusan di atas maka Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar pada Perubahan Rencana strategis Tahun 2021 - 2026 Menetapkan tujuan “Mewujudkan Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD”

Dengan tujuan tersebut, Sekretariat DPRD diharapkan dapat memberikan fasilitasi terhadap optimalisasi Kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam implementasi Trifungsi DPRD yaitu fungsi pembentukan Peraturan Daerah, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan. Dalam Pembentukan Peraturan Daerah sangat dibutuhkan harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah dalam proses Penetapan produk hukum yang berkualitas dan partisipatif yang mampu mangakomodir kepentingan masyarakat.

Dari uraian diatas dalam mendukung tercapainya kebijakan tersebut kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Sekretariat DPRD sebagai berikut:

- a. Tugas Utama : Meningkatkan Kualitas dan fasilitasi Pelayanan dalam Setiap Kegiatan DPRD

Dengan program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
Rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
2. Pembahasan Kebijakan Anggaran
3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
4. Peningkatan Kapasitas DPRD

5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
 6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
 7. Fasilitasi Tugas DPRD
- b. Tugas Pendukung : Persentase pemenuhan sarana dan prasarana
- Selain dari pada faktor utama, terdapat faktor pendukung dalam menunjang optimalisasi kinerja DPRD terkait sarana dan prasarana yang memadai serta Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD yang terampil, akuntabel dan professional sehingga tugas dan fungsi fasilitasi terhadap 3 fungsi DPRD yakni fungsi anggaran, pengawasan dan legislasi dapat dilaksanakan secara optimal.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

a. Tujuan

Tujuan adalah hasil akhir yang hendak dicapai dalam periode jangka waktu yang telah ditentukan. Penetapan tujuan harus dapat menggambarkan isu-isu strategis yang ingin dicapai oleh semua unit-unit kerja dalam suatu organisasi. Penetapan tujuan tidaklah mutlak harus terukur atau kuantitatif, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang. Sehubungan dengan pencapaian tujuan tersebut, Sekretariat DPRD sebagai salah-satu SKPD yang memiliki peran dalam mewujudkan visi, misi Kepala Daerah, dalam Rencana Kerja Tahun 2025 menetapkan tujuan yang ingin dicapai yakni sebagai berikut: *“Mewujudkan reformasi birokrasi Sekretariat DPRD”*

b. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam Renja ini adalah:

1. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah;
2. Meningkatnya dukungan layanan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yakni fungsi pembentukan Perda, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

Demikian pula untuk target dari indikator tujuan dan sasaran Renja sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025

juga mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 yaitu sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1

Tujuan sasaran, Indikator dan Target Kinerja Sekretariat DPRD TA 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator tujuan / sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun 2025
1	2	3	4	5
	Mewujudkan reformasi birokrasi Sekretariat DPRD		Indeks reformasi secretariat DPRD	73 (B)
		Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	BB(75)
			Laporan Keuangan yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	Sesuai
		Meningkatnya dukungan layanan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yakni fungsi pembentukan Perda, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.	Persentase pelaksanaan program kerja DPRD tepat waktu	100%
			Tingkat Kualitas Layanan Sekretariat DPRD	80

Sumber : Renstra Perubahan Sekretariat DPRD Kab. Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026

3.4 Program dan Kegiatan

Program adalah rangkaian kegiatan yang tersusun secara sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan oleh suatu atau beberapa instansi/organisasi dalam hal ini adalah Instansi Pemerintah untuk mendapatkan suatu hasil yang diharapkan. Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan dalam merealisasikan program. Kegiatan mencerminkan strategi yang konkrit untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar , maka pada tahun 2025 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar merencanakan 2 program dan 17 kegiatan,

termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin. Dalam merumuskan Program dan kegiatan tersebut terdapat beberapa pertimbangan pencapaian visi misi kepala daerah, dan peraturan perundang undangan yang setiap saat berubah.

- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA terdiri dari 10 kegiatan, meliputi :
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - i. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
 - j. Layanan Administrasi DPRD
- PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS FUNGSI DPRD terdiri dari 7 kegiatan meliputi :
 - a. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
 - b. Pembahasan Kebijakan Anggaran
 - c. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
 - d. Peningkatan Kapasitas DPRD
 - e. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
 - f. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
 - g. Fasilitasi Tugas DPRD

Total kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp 27.658.984.000, yang semuanya bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Selayar.

Tabel rencana Program dan kegiatan Sekretariat DPRD TA Anggaran 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.2

Tabel T-C 33

Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 Dan Perkiraan Maju Tahun 2026

Kabupaten Kepulauan Selayar

Sekretariat DPRD

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penring	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target capaian	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana		Target capaian	Kebutuhan Dana
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	2	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata persentase keterpenuhan capaian kinerja dan keuangan		100%	17.765.533.700	Dana Alokasi Umum		1	21.189.153.697

4	2	1					Persentase keterpenuhan sarana dan prasarana Aparatur yang memadai		100%				1	
4	2	1	2	1		Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase Keterpenuhan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja		100%	144.395.100			1	397.939.216
4	2	1	2	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	5 Dok	91.280.200			5	131.000.000
4	2	1	2	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	1 Dok	7.480.000			1	17.000.000

4	2	1	2	1	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	1 Dok	5.574.900			1	17.000.000
4	2	1	2	1	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	1 Dok	4.030.000			1	14.000.000
4	2	1	2	1	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	1 Dok	4.030.000			1	14.000.000

4	2	1	2	1	6	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	12 Lap	17.000.000			12	94.328.147
4	2	1	2	1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	1 Lap	15.000.000			1	110.611.069
4	2	1	2	2		Admnistrasi keuangan perangkat daerah	Persentase Keterpenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan		100%	2.399.074.850			1	2.268.981.780

4	2	1	2	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang memperoleh gaji dan tunjangan	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	26 Orang/Bulan	2.324.644.150			26	2.060.637.780
4	2	1	2	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng					1	5.000.000
4	2	1	2	2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pegujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	12 Dok	18.243.300			12	62.130.000

4	2	1	2	2	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	12 Dok	18.000.000			12	48.890.000
4	2	1	2	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	1 Lap	7.611.400			1	12.000.000
4	2	1	2	2	6	Pegelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	1 Dok	17.076.000			1	45.870.000

4	2	1	2	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	12 Lap	13.500.000			12	34.454.000
4	2	1	2	3		Admnistrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Dokumen Barang Milik Daerah		100%	10.000.000			100	53.910.000
4	2	1	2	3	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	2 Dok	3.000.000			2	5.000.000

4	2	1	2	3	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	4 Lap	2.000.000			12	38.910.000
4	2	1	2	3	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	2 Lap	5.000.000			12	10.000.000
4	2	1	2	5		Admnistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Pegawai Perangkat Daerah		100%	137.834.500			100	635.753.125
4	2	1	2	5	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	4 Dok	3.013.200			12	28.000.000
4	2	1	2	5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan						10	182.325.938

4	2	1	2	5	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	29 Orang	134.821.300			29	425.427.188
4	2	1	2	6		Admnistrasi Umum Perangkat daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum		100%	523.361.000			100	1.073.890.739
4	2	1	2	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	20 Paket	15.310.000			20	15.310.000
4	2	1	2	6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan						2	100.000.000

4	2	1	2	6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng					200	75.000.000
4	2	1	2	6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	40 Paket	42.444.300			40	53.482.275
4	2	1	2	6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	12 Lap	117.815.000			12	56.500.000
4	2	1	2	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	36 Lap	347.791.700			36	623.598.464

4	2	1	2	6	10	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						2	150.000.000
4	2	1	2	7		Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Keterpenuhan Sarana dan Prasarana Kerja		100%	395.273.600			100	279.842.063
4	2	1	2	7	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng						
4	2	1	2	7	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	7 Unit	92.950.000				

4	2	1	2	7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	13 Unit	302.323.600			13	121.826.250
4	2	1	2	7	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan						35	158.015.813
4	2	1	2	8		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Keterpenuhan Jasa Urusan Pemerintahan		100%	756.656.450			100	620.954.484
4	2	1	2	8		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	12 Lap	8.108.950			12	18.232.594

4	2	1	2	8	1	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	12 Lap	316.740.000			12	309.467.637
4	2	1	2	8	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	12 Lap	431.807.500			12	293.254.253
4	2	1	2	9		Pemeliharaan Barang Milik daerah penunjang pemerintah daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik		100%	938.472.500			100	513.349.910

4	2	1	2	9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan PerOrangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	4 Unit	196.470.000			4	183.264.000
4	2	1	2	9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	37 Unit	97.862.500			38	99.698.254
4	2	1	2	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	35 Unit	28.770.000			50	30.387.656

4	2	1	2	9	9	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	5 Unit	615.370.000			6	200.000.000
4	2	1	2	15		Layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	Persentase Keterpenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		100%	11.538.896.300			100	15.220.904.000
4	2	1	2	15	1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	25 Orang/Bulan	11.162.865.900			25	14.249.300.000
4	2	1	2	15	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	125 Paket	336.958.400			125	440.644.000
4	2	1	2	15	3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	25 Orang	39.072.000			25	530.960.000

4	2	1	2	16		Layanan Administrasi DPRD	Persentase Keterpenuhan Layanan Administrasi DPRD		100%	921.569.400			100	123.628.380
4	2	1	2	16	1	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	12 Dok	10.020.500			12	50.875.000
4	2	1	2	16	2	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	3 Lap	5.036.000			12	28.983.000
4	2	1	2	16	3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	8 Lap	18.512.900			14	43.770.380
4	2	1	2	16	4	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	8 Paket	888.000.000				

4	2	2				PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Program Kerja DPRD yang Terintegrasi dengan Program RPJMD dan RKPD (%)		100%	12.783.955.100			1	20.225.675.362
							Rata rata persentase keterpenuhan layanan terhadap pelaksanaan tugas anggota DPRD dalam fungsi Pengawasan, penganggaran dan pembentukan perda		100%				1	
4	2	2	2	1		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Cakupan Layanan dalam Pembahasan Perda (%)		100%	1.852.902.200			100	4.236.037.250
4	2	2	2	1	1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	5 Dok	22.661.000			5	398.553.750

4	2	2	2	1	2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	30 Dok	1.830.241.200			30	3.271.557.500
4	2	2	2	1	4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi						3	220.926.000
4	2	2	2	1	5	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun						1	345.000.000
4	2	2	2	2		Pembahasan kebijakan anggaran	Persentase Rapat Pembahasan yang terselenggara terhadap rapat yang terjadwal		100%	689.680.200			100	929.303.750
4	2	2	2	2	1	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	10 Dok	23.005.300			10	60.775.313

4	2	2	2	2	2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	10 Dok	17.995.000			10	60.775.313
4	2	2	2	2		Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	11 Dok	225.236.000			11	303.876.563
4	2	2	2	2	4	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	11 Dok	211.155.500			11	303.876.563
4	2	2	2	2	6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	10 Dok	212.288.400			10	200.000.000

4	2	2	2	3		Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan	Rata-Rata Persentase Rapat dan Kunjungan Kerja yang diselenggara terhadap rapat yang terjadwal		100%	3.436.401.700			100	1.463.477.612
4	2	2	2	3	1	Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	15 Lap	1.176.174.600			15	271.610.949
4	2	2	2	3	2	Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Insfrakstruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	15 Lap	980.226.200			15	253.980.031
4	2	2	2	3	3	Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	15 Lap	1.052.166.200			15	243.040.475

4	2	2	2	3	4	Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	15 Lap	23.140.500			15	253.980.031
4	2	2	2	3	5	Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	15 Lap	134.121.000			15	207.950.000
4	2	2	2	3	6	Pengawasan Urusan Pemerintahan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh BPK	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	5 Dok	56.935.200			5	206.399.039
4	2	2	2	3	7	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	5 Dok	2.512.200			5	9.500.000

4	2	2	2	3	8	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	5 Dok	11.125.800			5	17.017.088
4	2	2	2	4		Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Keterpenuhan Layanan Peningkatan Kapasitas lembaga DPRD		100%	2.698.497.000			100	5.651.612.000
4	2	2	2	4	2	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	25 Dok	520.393.000			78	2.500.000.000
4	2	2	2	4	3	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	60 Dok	295.000.000			60	264.000.000

4	2	2	2	4	4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	21 Orang	93.954.000			21	170.612.000
4	2	2	2	4	5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	60 Orang	180.000.000			60	186.000.000
4	2	2	2	4	6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	75 Dokumen	1.609.150.000			75	2.520.000.000
4	2	2	2	4	7	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD						1	11.000.000
4	2	2	2	5		Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	Cakupan Layanan dalam penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat (%)		100%	2.476.260.900			100	2.521.909.000

4	2	2	2	5	1	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	75 Lap	316.260.900			75	371.909.000
4	2	2	2	5	2	Penyusunan Pokok Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun						1	5.000.000
4	2	2	2	5	3	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	75 Dok	2.160.000.000			75	2.145.000.000
4	2	2	2	6		Pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD	Cakupan Layanan dalam Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik		100%	64.224.200			100	85.000.000
4	2	2	2	6	2	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	5 Lap	64.224.200			5	85.000.000

4	2	2	2	8		Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Keterpenuhan Layanan Terhadap Tugas DPRD		100%	1.565.988.900			100	5.338.335.750
4	2	2	2	8	1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	33 Dok	185.640.000			44	3.850.000.000
4	2	2	2	8	2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun						1	5.223.600
4	2	2	2	8	3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Kab. Kepulauan Selayar, Benteng, Benteng	10 Dok	219.005.100			10	170.000.000

4	2	2	2	8	4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Kab. Kepulaua n Selayar, Benteng, Benteng	53 Dok	1.161.343.800			60	1.313.112.150
---	---	---	---	---	---	-----------------------------------	---	---	--------	---------------	--	--	----	---------------

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja menggambarkan tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Perangkat Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang memuat tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Rencana Kerja pemerintah daerah digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berjalan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan dan merencanakan anggaran.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif akan dijabarkan kedalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Rumusan Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kab. Kepulauan Selayar terdiri dari 2 program dan 17 kegiatan dengan kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp. 27.658.984.000. Rencana program, kegiatan dan pendanaan indikatif adalah sebagai berikut :

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan diatas maka ditetapkanlah program dan kegiatan nyata sehingga strategi yang telah ditetapkan dapat di

implementasikan. Berikut Program kegiatan Sekretariat DPRD Kab. Kepulauan Selayar dalam kurun waktu 5 tahun ke depan :

6.1 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

6.1.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Kota

a. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPASKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPASKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
- Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
- Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- Pemulangan Pegawai yang Pensiun
- Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas
- Pemindahan Tugas ASN
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen instalasi listrik
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan bahan logistic kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Fasilitasi kunjungan tamu
- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- Dukungan Pelaksanaan system pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD

f. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pengadaan Mebel
- Pengadaan peralatan dan Mesin Lainnya
- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

g. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

h. Pemeliharaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Perorangan
- Pemeliharaan mebel
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

i. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

- Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
- Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD
- Pelaksanaan Medical Check Up DPRD

j. Layanan Administrasi DPRD

- Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD
- Fasilitas Fraksi DPRD
- Fasilitas Rapat
- Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD

6.1.2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Fungsi DPRD

- a. Pembentukan Peraturan daerah
- b. Pembahasan kebijakan anggaran
- c. Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan
- d. Peningkatan Kapasitas DPRD
- e. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi masyarakat
- f. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik
- g. Pembahasan kerja sama daerah
- h. Fasilitas Tugas DPRD

BAB V

PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar TA 2025 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan selama satu tahun yang akan dilaksanakan dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin terjadi pada saat Rencana Kerja dilaksanakan, dan sebagai tolak ukur akuntabilitas kinerja dengan mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Dalam satu tahun pelaksanaan Rencana Kerja TA 2025 akan terus dilakukan penyesuaian atas berbagai perubahan kebijakan/peraturan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan tujuan sasaran dan tupoksi Sekretariat DPRD.

Untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan akan diadakan evaluasi dan dipertanggungjawabkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Bupati.

Untuk meningkatkan capaian kinerja di masa mendatang telah menetapkan beberapa kebijakan strategis yang perlu mendapat perhatian, antara lain dengan :

- a. Penyediaan anggaran yang memadai secara bertahap untuk dapat mengakomodir masukan Anggota DPRD dari Survey Tingkat Kualitas Layanan Sekretariat DPRD dan LHE SAKIP;
- b. Penyediaan Sumber Daya Aparatur sesuai dengan formasi bidang tugas yang dibutuhkan dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan terhadap DPRD;
- c. Intensif dalam melakukan penyesuaian terhadap peraturan terbaru terkait pelayanan kepada Anggota DPRD dan menjalin komunikasi yang baik dengan Anggota DPRD.

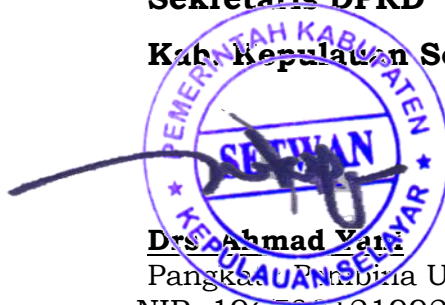
Demikian Rencana Kinerja (Renja) Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025. Semoga Renja ini dapat berfungsi sebagai bahan masukan dalam menyusun dan menetapkan kebijakan pembangunan daerah pada tahun 2025.

Demikian untuk dilaksanakan.

Benteng, Agustus 2025

Sekretaris DPRD

Kab. Kepulauan Selayar,

The image shows a circular official stamp of the DPRD of Kepulauan Selayar. The outer ring of the stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR" and "BENTENG". The center of the stamp has the word "SEKRETARIAT" in large letters. A handwritten signature in blue ink is written across the stamp, overlapping the word "SEKRETARIAT".

Drs. Ahmad Yari

Pangkasia Pembina Utama Muda

NIP. 196703121992031004

